

Volume 6. Nomor 1 April 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr, Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE
Volume 6. Nomor 1 April 2016

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahNya, hingga April 2016 ini Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE Progdi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 6 Nomor 1. Penerbitan Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2016

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6. Nomor 1 April 2016

DAFTAR ISI

1. ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PD PASAR SURYA KOTA SURABAYA
Sri Wibawani dan Tukiman 1
2. ANALISIS TRANSPARANSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Moch. Ali Mashuri 13
3. PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF PARTICIPATORY GOVERNANCE (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya)
Agus Widiyarta dan Ertien Rining Nawangsari 23
4. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
Ertien R. Nawangsari, Eko Purwanto, Susi Hariyawati..... 43
5. AGENDA KEBIJAKAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN:STUDI PERUMUSAN MASALAH (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi)
Akbar Pandu Dwinugraha 55
6. AKUNTABILITAS KINERJA KOPERASI UNIT DESA DI ERA REFORMASI (Studi Produktivitas Susu Sapi Perah di KUD BATU)
Cahyo Sasmito 65
7. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI SURABAYA (Studi Tentang Izin Trayek Angkutan Kota Di Surabaya)
Ratna Puspitasari 73
8. STRATEGI GENERIK DALAM REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Meirinawati , Indah Prabawati..... 87
9. KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI SIDOARJO
Rusdi Hidayat Nugroho 97

**AGENDA KEBIJAKAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN:
STUDI PERUMUSAN MASALAH**
(Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Akbar Pandu Dwinugraha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hangtuh Surabaya
Email: ap.dwinugroho@gmail.com

ABSTRACT

Sustainable environment policy essentially has goal to achieve sustainable development. In the other side, environment policy can be defined as a part that can balancing between social, economic and environmental development in order to be run simultaneously. Banyuwangi Regency still and being fast growing, benefited due to has many tourism sector for several time sounded by many people. Call it red island, green bay and G-land that quickly became an international destination, but it is only part of a wide range of destinations on offer. But as soon as these sectors become levers of economic growth in Banyuwangi Regency. Economic development wherever the existence later a chance to run over environmental sustainability. This study offers an alternative solution by utilizing existing environmental issues and then integrate those issuestrought current conditions, the negative implications and key leverage that will further aggravate the situation when the problem is not fixed.

Key Words: Policy, Environment, Economic

ABSTRAK

Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan lingkungan dapat didefinisikan sebagai bagian yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan agar dapat berjalan secara simultan. Kabupaten Banyuwangi masih dan menjadi cepat tumbuh, manfaat karena memiliki banyak sektor pariwisata selama beberapa waktu terdengar oleh banyak orang. Sebut saja pulau merah, green bay dan G-tanah yang cepat menjadi tujuan internasional, tetapi hanya bagian dari berbagai tujuan wisata yang ditawarkan. Tapi begitu sektor ini menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. pembangunan ekonomi di mana pun keberadaan nanti kesempatan untuk menjalankan lebih kelestarian lingkungan. Penelitian ini menawarkan solusi alternatif dengan memanfaatkan isu-isu lingkungan yang ada dan kemudian mengintegrasikan mereka issuestrought kondisi saat ini, implikasi negatif dan leverage kunci yang akan memperparah situasi ketika masalah tidak tetap.

Key Words: Kebijakan, Lingkungan, Ekonomi.

PENDAHULUAN

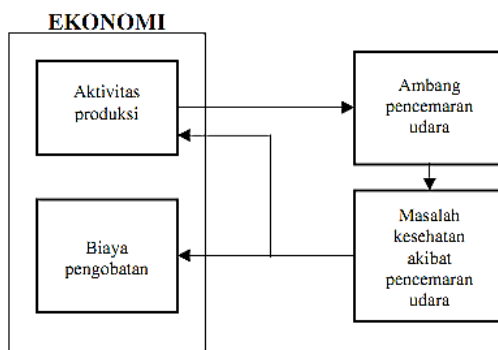
Sun Rise Of Java itulah sebutan untuk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Kabupaten ini bisa dikatakan termasuk yang paling berkembang diantara yang lainnya atau mengalami kemajuan ekonomi sebagaimana yang tertulis dalam judul tulisan ini. Kondisi ini menjadi tidak mengherankan ketika kemajuanataupun pembangunan suatu daerah diukur melalui pertumbuhan ekonominya (Todaro,1994)Tanpa disangka-sangka bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi menurut data BPS yaitu sebesar 6,76% telah melampaui Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 5,78%. Lebih mengherankan lagi ketika setahun berikutnya yaitu ditahun 2014 bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi juga telah melampaui Pertumbuhan ekonomi nasional yang pada saat itu mengalami penurunan. Dari pertimbangan tersebut banyak pakar yang tidak ragu untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2016 bisa mencapai 7,52%.

Kabupaten Banyuwangi yang notabene sedang berkembang sangat diuntungkan dengan melimpahnya sektor pariwisata yang beberapa waktu ini terdengar ramai ditelinga banyak orang. Sebut saja red island, green bay dan G-land yang saat ini secara sangat cepat menjadi tak ubahnya destinasi pariwisata internasional, padahal itu hanya sebagian dari beraneka macam destinasi yang ditawarkan. Tetapi seketika sektor tersebut menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data yang ada memang betul bahwa pariwisata daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai penunjang paling besar pertumbuhan ekonomi dengan ketercapaian rata-rata 10,47% dalam 4 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dipengaruhi oleh peningkatan modal dan tenaga kerja. Hal ini memang terbukti untuk kabupaten ini. Bagaimana tidak, berdasarkan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ternyata jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Banyuwangi yang ditargetkan mencapai 50 milyar tanpa disangka terealisasi hampir 250% yaitu sejumlah 2.345 milyar rupiah. Peningkatan jumlah nilai investasi daerah sebenarnya bergantung kepada sejauh mana daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk menarik minat daripada investor dan kabupaten ini mampu melakukan itu. Disisi lain, rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi terealisasi melampaui penargetan yang telah ditentukan. Hal ini juga tidak mengherankan karena daya serap tenaga kerja merupakan variabel dependen yang dipengaruhi peningkatan modal.

Sayangnya pembangunan ekonomi dimanapun keberadaannya nanti, sangat berpeluang untuk menggilas keberlanjutan lingkungan terutama pada saat belum adanya *environmental safeguard* sebagai pendukung keberlanjutan lingkungan yang merupakan salah satu bagian dari *environmental governance* (Syakrani, 2011). Kabupaten Banyuwangi yang semakin berkembang dengan pintu masuk

sektor pariwisatanya juga tidak mungkin akan menghalangi perkembangan industri dan perdagangan yang nantinya juga berpeluang besar untuk ikut berkembang. Resosudarmo dan Thorbecke (1996) melakukan penelitian terkait hubungan antara perekonomian dan pencemaran lingkungan yang menghasilkan rumusan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Hubungan antara Perekonomian dan Pencemaran Udara

Dari gambar diatas, pencemaran udara merupakan produk sampingan dari aktifitas produksi yang menggunakan bahan beracun. Bahan beracun tersebut diartikan sebagai bahan bakar proses produksi seperti bensin dan solar. Tingkat pencemaran udara yang tinggi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mereka yang terkena gangguan kesehatan tersebut akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara akan mengurangi efektivitas kegiatan produksi. Hal tersebut menjadi siklus yang merugikan pada saat belum adanya antisipasi untuk mengatasi permasalahan pencemaran

udara akibat kegiatan perekonomian. Maka dari itu diperlukan kajian lingkungan yang menjaga keseimbangan keduanya. Perencanaan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah sebenarnya telah termaktub dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing.

Dokumen perencanaan ditingkat satuan kerja perangkat daerah, kita mengenal istilah renstra yang merupakan kependekan daripada rencana strategis. Dilevel daerah tingkat II kabupaten/kota, kita mengenal istilah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau lebih familiar disingkat RPJMD. Kedua dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengisyaratkan untuk menjadikan dokumen lingkungan sebagai telaahan. Telaahan yang dimaksud adalah penelaahan terhadap perencanaan pembangunan yang perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan terdegradasinya aspek lingkungan. Banyak khalayak yang menyebutkan bahwa hanya pembangunan dalam bidang fisik saja yang memerlukan telaahan terhadap lingkungan ternyata seluruh daripada program pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini dokumen kebijakan lingkungan tersebut bisa dianggap sebagai representasi daripada *environmental safeguard*.

Kebijakan lingkungan berkelanjutan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Secara konseptual pengertian pembangunan berkelanjutan menurut ahossane (2001) diartikan sebagai “*meets the needs of the present without compromising the capacity to meet the needs of future generations*”. Pengertian tersebut memiliki inti berorientasi pada masa depan dan yang pasti memerlukan integrasi lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi agar lingkungan tidak terdegradasi. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup lingkungan/alam terhadap tekanan dari pada pembangunan ekonomi daerah.

Disisi lain kebijakan lingkungan juga bisa dipahami sebagai muatan yang menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan agar bisa berjalan secara simultan. Hal tersebut termaktub dalam pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Goodland (1995) bahwa pembangunan berkelanjutan dibedakan menjadi empat meliputi kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*), keberlangsungan ekonomi (*economic sustainability*), kelestarian lingkungan (*social sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri (*sustainable development*). Goodland mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai integrasi dari tiga aspek yakni kelestarian sosial, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi.

Orang Indonesia pintar dalam membuat kebijakan yang baik, tetapi

seringkali salah dalam menentukan permasalahan yang tepat. Maka dari itu penelitian ini memberikan muatan penting tentang apa yang menjadi permasalahan pada saat pembuatan kebijakan (Jones,1994) danurgensi diperlukannya perumusan masalah kebijakan lingkungan berkelanjutan sebagai pengejawantahan daripada proses *environment safeguard* dan juga sebagai konsekuensi kemajuan pembangunan perekonomian daerah. Sejauh mana Kabupaten Banyuwangi memperhatikan isu lingkungannya, dampak yang berpeluang terjadi dan apa sebenarnya pengaruh utamanya yang perlu untuk dijadikan pemecah masalah lingkungan kedepan sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi yang telah sebegitu gencarnya dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menggambarkan isu-isu lingkungan sebagai dasar dalam melakukan perumusan masalah utama kebijakan dengan mempertimbangkan integrasi antara kondisi saat ini, dampak negatif yang berpeluang terjadi dan pengaruh utama yang melatar belakangi permasalahan. Maksud daripada isu-isu lingkungan mencakup segala permasalahan terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan dengan beberapa cara yang meliputi observasi, wawancara mendalam, *forum group discussion*, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sejak Januari 2015. Informan diseleksi menyesuaikan kesesuaian dan

kebutuhan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Data di analisis dengan teknik interaktif yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan verifikasi (Miles dan Huberman, 2000)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-isu lingkungan merupakan permasalahan terkait lingkungan yang berpeluang untuk menjadi merugikan ketika tidak dilakukanantisipasi. Isu lingkungan di Kabupaten Banyuwangi di dasarkan kepada permasalahan yang selalu dialami dilihat dari ketercapaian indikator kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan data tersebut, isu lingkungan di Kabupaten Banyuwangi meliputi:

- a. Tsunami, gunung api dan bencana lain
- b. Alih fungsi lahan produktif
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)
- d. Sampah dan sanitasi perkotaan
- e. Lahan pertanian

Kelima isu lingkungan diatas akan dilakukan analisa dengan mengintegrasikan kondisi eksisting, implikasi negatif yang terjadi ketika tidak dilakukan tindak lanjut dan pengaruh utama yang melatar belakangi permasalahan tersebut

berpeluang untuk menjadi lebih buruk sebagaimana berikut.

(a) Tsunami, Gunung Api dan Bencana Lain

Potensi penyebab bencana di Kabupaten Banyuwangi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Namun untuk isu Kabupaten Banyuwangi lebih menitik beratkan kepada isu mengenai bencana alam. Bencana alam yang dimaksud antara lain berupa gempa bumi, tsunami, abrasi, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011.

Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak data dan informasi yang langsung bisa dilihat oleh publik terkait dengan penjelasan mengenai bencana dan wilayah potensi bencana

yang ada termasuk juga mengenai laporan yang selalu diupdate setiap harinya untuk beberapa ancaman atau potensi bencana seperti Tsunami, Gunung Berapi dan pergerakan tanah. Hal ini tentu menjadikan salah satu upaya preventif yang dilakukan mengingat Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan di pulau Jawa. Luasnya 5.782,50 km². Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m) terdapat Kawah Ijen, keduanya adalah gunung api aktif.

Permasalahan yang ada adalah, BPBD Kabupaten Banyuwangi termasuk instansi yang tergolong baru dijalankan. Implementasi kinerja masih belum menitikberatkan kepada fokus yang jelas karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator terkait bencana hanya dalam hal kebakaran. Sudah pasti instansi terkait belum memiliki *guiden* terkait indikator apa yang perlu untuk dibuat dan dijadikan acuan untuk mengukur keamanan terhadap bencana alam terlebih lagi pembangunan di sektor ekonomi, industri dan perdagangan berpotensi memunculkan resiko bencana alam, non alam ataupun sosial sekalipun. Berdasarkan data, dampak Negatif bencana yang berpotensi muncul

pada kawasan Banyuwangi meliputi resiko bencana tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, resiko abrasi, resiko kekeringan. Berdasarkan kondisi eksisting yang saat ini ada, kelemahan yang dimiliki dan dampak negatif yang berpotensi untuk muncul maka permasalahan kunci yang menjadi pengaruh utama jika terjadinya bencana adalah rendahnya ketahanan bencana di Kabupaten Banyuwangi.

Ketahanan bencana merupakan suatu kondisi dimana suatu daerah bisa dianggap tangguh dalam menghadapi bencana. Ketika ketahanan tersebut belum didukung dengan kinerja terukur yang mampu memastikan ketangguhan terhadap bencana bisa dikatakan ketahanan bencana daerah tersebut masih rendah.

(b) Alih Fungsi Lahan Produktif

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di kawasan Asia saat ini sedang mengalami tekanan terhadap ketahanan pangan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun 2009 hingga tahun 2011, yaitu sekitar 2 juta ton. Sebenarnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) memberikan harapan untuk terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan isu utama dalam pembangunan

Indonesia kedepan. Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai lumbung pangan nasional karena kontribusi pengadaan pangannya yang sangat besar, yaitu sebesar 17% dari total nasional. Namun ironisnya, produksi pangan Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir sedang mengalami penurunan, terutama produksi padi, dan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab sebagai penyedia produksi padi adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kontributor beras terbesar di Jawa Timur, namun beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2010 – 2011, terjadi penurunan produksi padi yang cukup besar, yaitu sekitar 13%. Penurunan produksi tersebut ternyata diikuti juga oleh penurunan luas lahan pertanian pangan (sawah) yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1400 Ha atau penurunan sebesar 2%. Perlu diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian pada periode tersebut relative tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa konversi lahan pertanian pangan akan mempengaruhi produksi pertanian. dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya pengendalian konversi lahan pertanian pangan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Kecamatan Wongsorejo merupakan salah satu kawasan pertanian Kabupaten Banyuwangi dengan konversi lahan pertanian pangan tertinggi. Berdasarkan kondisi diatas dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dan permasalahan kunci dalam hal ini adalah tingginya

konversi lahan pertanian. Tingginya konversi lahan pertanian secara sistemik akan menurunkan produktifitas lahan pertanian dan produksi hasil pertanian. Semakin buruknya hal tersebut akan mengancam keamanan pangan Kabupaten Banyuwangi.

(c) Pencemaran Lingkungan (Air, Udara, Tanah)

Potensi dan kekayaan sumber daya alam wilayah Kabupaten Banyuwangi selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan didayagunakan untuk kepentingan pembangunan dan diantaranya sumber daya alam yang ada masih banyak yang belum didayagunakan dan dimanfaatkan.

Pada umumnya pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam kurang memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya belum dilakukan secara efektif dan efisien, disamping itu perlakuan terhadap sumber daya alam cenderung eksploitatif tanpa diimbangi upaya konservasi dan rehabilitasi yang memadai sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kecenderungan ini selain beresiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup juga dapat merusak struktur dan fungsi ekosistem.

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki berbagai jenis usaha/kegiatan baik bidang perikanan, perkebunan dan infrastruktur lainnya, apabila dalam proses kegiatannya tidak diolah dan dikeloladengan baik, maka

dimungkinkan dapat sebagai sumber pencemar bagi lingkungan hidup sekitar bahkan secara terakumulasi bisa menimbulkan pencemaran bagi masyarakat Banyuwangi. Aspek lingkungan hidup sangat terkait dengan perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk telah menyebabkan meningkatnya beban lingkungan. Rata-rata sampah meningkat dari 912,5 kg per hari tahun 2005 menjadi 2,9 ton per hari tahun 2008. Demikian pula beban pencemaran limbah industri, mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan Tahun 2010 menunjukkan bahwa 20 % pengusaha yang dipantau tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang ke darat sehingga terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan, hanya 5 % pengusaha yang memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut, Pengusaha tidak memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. Masih ada pengusaha yang tidak memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan, Semua pengusaha tidak menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data tersebut, dampak Negatif yang Ditimbulkan adalah tingginya keterjangkitan penyakit di masyarakat. Permasalahan Kunci yang bisa diidentifikasi adalah

Jumlah penduduk, pertumbuhan industrialisasi dan gaya hidup masyarakat yang tidak ramah lingkungan.

(d) Sampah dan Sanitasi Perkotaan

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga setiap harinya. Penanganan sampah merupakan kegiatan utama Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Kondisi pada tahun 2013 terpaparkan bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 74,8%, pencapaian ini melebihi target akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 60%. sayangnya kondisi ini tidak membuktikan bahwa dalam pelaksanaannya pihak terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi tidak mengalami kendala.

Kendala yang seringkali masih menjadi hambatan adalah alat dan tenaga operasional pengangkut sampah yang sangat terbatas, karena jumlah sampah industri, rumah tangga yang semakin hari semakin tinggi, sangat membutuhkan lahan baru sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Kecanggihan teknologi juga dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dampak yang akan dihadapi pada saat ini penanganan sampah belum memiliki solusi adalah sangat mempengaruhi kebersihan dan keindahan kawasan perkotaan. Jumlah sampah yang setiap harinya bertambah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat apabila tidak bisa dimanajemen secara baik dan

berwawasan lingkungan. Dampak Negatif yang Ditimbulkan Sistem daur ulang sampah yang rendah akan meningkatkan volume sampah perkotaan, konsumsi masyarakat memicu produksi sampah yang bertambah diperkotaan. Maka dari itu kunci permasalahan yang mempengaruhi permasalahan yang lainnya adalah tingginya volume sampah di Kabupaten Banyuwangi.

(e) Lahan Pertanian

Sumber daya air yang terpadu dalam bidang pertanian sangatlah penting. Diantaranya dalam pemenuhan fasilitas sarana irigasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut sangat memiliki fungsi penting sebagai pendukung utama lahan pertanian. Data yang didapat dari Kabupaten Banyuwangi diantaranya pencapaian indikator rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi telah mencapai target yaitu 75% di tahun 2013. Target di tahun 2015 adalah sebesar 85%. Kinerja yang nantinya akan dilakukan harus secara terfokus dijalankan karena dari permasalahan yang ada dilapangan adalah masih terdapat banyak saluran irigasi yang belum terinventarisasi, banyak saluran irigasi dengan sistem saluran sederhana (galengan). Dampak yang nantinya akan terjadi pada saat permasalahan belum bisa ditangani adalah debit air dalam sistem irigasi yang ada saat ini akan berkurang dan mempengaruhi pendistribusian air terhadap lahan pertanian.

Data mengenai sumber mata air dalam kondisi debit air stabil di Kabupaten Banyuwangi yang ditargetkan mencapai realisasi 70% di tahun 2013 belum bisa terpenuhi dan hanya terealisasi 60%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya

sumber air yang dimiliki perorangan, pemerintah dalam hal ini masih belum melakukan kajian daerah-daerah yang memiliki kapasitas debit air tinggi. Jika hal ini berlanjut menjadi permasalahan maka dampaknya adalah daya dukung air sebagai pendukung lahan pertanian akan menurun dan mengakibatkan kekeringan.

Data Mengenai Ketersediaan air untuk irigasi dan lain keperluan. Target pada tahun 2013 yaitu 50% telah tercapai. Tetapi permasalahan yang masih dihadapi adalah mengenai belum adanya kajian mengenai penurunan debit air dan ketika musim kemarau datang, tiba-tiba terjadi penurunan debit air sampai mencapai lebih kurang 60%. Hal ini yang perlu dilakukan kewaspadaan. Karena dampak jika tidak dilakukan penyelesaian akan secara tiba tiba menimbulkan kekeringan lahan pertanian secara mendadak. Dampak Negatif yang Ditimbulkan Berkurangnya Sumber Mata Air, Berkurangnya Daerah Tangkapan Air, Menurunnya Kualitas Lahan, Meningkatnya Alih Fungsi Lahan, Tingginya Kondisi Rawan Air. maka dari itu permasalahan yang mampu mengungkit segala permasalahan lainnya adalah menurunnya volume sumber daya air.

KESIMPULAN

Kebijakan lingkungan berkelanjutan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Disisi lain kebijakan lingkungan juga bisa dipahami sebagai muatan yang menyeimbangkan antara

pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan agar bisa berjalan secara simultan. Kabupaten Banyuwangi yang notabene sedang berkembang sangat diuntungkan dengan melimpahnya sektor pariwisata yang beberapa waktu ini terdengar ramai ditelinga banyak orang. Sebut saja red island, green bay dan G-land yang saat ini secara sangat cepat menjadi tak ubahnya destinasi internasional, padahal itu hanya sebagian dari beraneka macam destinasi yang ditawarkan. Tetapi seketika sektor tersebut menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan ekonomi dimanapun keberadaannya nanti berpeluang untuk menggilas keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menawarkan rumusan masalah utama yang mampu menjadi agenda kebijakan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahossane, K., 2001: *Manufacturing Industry and Sustainable Development in Cote d'Ivoire*. Unido, Viena

Goodland. Robert. 1995: *The Concept of Environmental Sustainability*. Washington DC.

Jones O. Charles. 1994. *Public Policy*. Jakarta: Gravindo Persada

Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Miles, M.B., dan A.M. Huberman. 1990. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.

Resosudarmo, B.P. dan E. Thorbecke. "The Impact of Air Pollution Policies on National Economic Growth and Household Incomes in Indonesia: A CGE Analysis." Jakarta, 7 Agustus 1996

Syakrani, 2011. *Desentralisasi Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Alam: Blessing or Cursing?* Bandung. JIANMaP IAPA